



Katalog 2202.7326

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Toraja Utara 2011



**Badan Pusat Statistik
Kabupaten Toraja Utara**



KATA PENGANTAR

Kebutuhan konsumen akan data statistik semakin kompleks, khususnya data sosial. Untuk memenuhi data tersebut Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara menerbitkan publikasi Indeks *Pembangunan Manusia Kabupaten Toraja Utara 2011*

Publikasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh tingkat kesejahteraan rakyat dan indikator yang berfungsi sebagai ukuran pencapaian keberhasilan Pembangunan Manusia di Kabupaten Toraja Utara.

Data yang digunakan untuk menganalisis dua hal tersebut di atas adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2010, disamping data sekunder yang berkaitan dengan pembangunan manusia.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga terbitnya publikasi ini diucapkan banyak terima kasih. Saran dan kritik sangat kami harapkan untuk perbaikan publikasi IPM selanjutnya.

Rantepao, Nopember 2011
BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TORAJA UTARA
Kepala,

SAMINGUN, S.SI
NIP 19600124 198202 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I . PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penulisan	3
1.3. Sistematika Penulisan	4
BAB II. METODOLOGI	5
2.1. Konsep dan Definisi.....	6
2.1.1. Angka Harapan Hidup	9
2.1.2. Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah	9
2.1.3. Purchasing Power Parity	11
2.2. Sumber Data	12
BAB III GAMBARAN UMUM	14
3.1. Letak Geografis	14
3.2. Kependudukan	14
<hr/>	
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Toraja Utara 2011	ii

3.3. Ekonomi (PDRB)	15
BAB IV KINERJA PEMBANGUNAN MANUSIA	17
4.1. Indeks Pembangunan Manusia	18
4.2. Bidang Kesehatan	20
4.2.1. Indeks Kesehatan	21
4.2.2. Indeks Pendidikan	21
4.2.3. Fasilitas Kesehatan	21
4.3. Bidang Pendidikan	23
4.2.1. Indeks Pendidikan	24
4.2.2. Angka Melek Huruf	25
4.2.3. Rata-rata Lama Sekolah.....	25
4.4. Bidang Ekonomi	27
4.5. Indeks Paritas Daya Beli	27
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	29
5.1. Kesimpulan	29
5.2. Saran	29

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM yang di gunakan dalam Penghitungan	8
Tabel 2.2 Jenjang Pendidikan dan Skor yang digunakan untuk Menghitung Rata-rata Lama Sekolah	11
Tabel 4.1 IPM Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Terdekat Tahun 2010	19
Tabel 4.2 IPM Kabupaten Toraja Utara Menurut Komponennya Tahun 2010	28

<http://torutkab.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu mengenai pembangunan manusia di Indonesia, sebenarnya bukan hal yang baru. Isu tersebut secara eksplisit maupun implisit menempati posisi sangat penting dalam falsafah negara Pancasila dan dokumen-dokumen kenegaraan lainnya yang strategis seperti UUD 1945, GBHN dan Repelita. Walaupun demikian, karena masalah prioritas, aksentuasinya baru dimulai dalam GBHN 1993 dan dijabarkan dalam Repelita VI. Tampaknya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa *Concern* mengenai pembangunan manusia sejak awal telah melandasi mainstream model pembangunan Indonesia paling tidak pada tataran *ideal* atau normatif.

Pada tahun 60-an banyak negara melaporkan bahwa di satu sisi berhasil mencapai pendapatan perkapita tinggi, namun di sisi lain penduduk miskin makin bertambah jumlahnya. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi akan sulit mencapai masyarakat yang makmur, aman dan terbebas dari tekanan hidup yang merupakan tujuan pembangunan itu sendiri. Pada hakekatnya keberhasilan pembangunan tidak dapat diukur dari berhasilnya membangun gedung-gedung pencakar langit serta jalan-jalan yang mulus akan tetapi harus diukur dari keberhasilan mengangkat harkat dan martabat rakyat yang ke tempat yang tinggi. Ini berarti pembangunan harus difokuskan pada manusia sebagai titik

sentralnya. Model-model alternatif pembangunan yang ditawarkan adalah pembangunan sumber daya manusia, kebutuhan dasar, dan kesejahteraan manusia, akan tetapi ketiga model pembangunan ini dinilai masih bersifat parsial belum bersifat holistik.

Pembangunan sumber daya manusia memandang manusia sebagai input dalam proses produksi, seperti halnya dengan faktor-faktor produksi lainnya yaitu, tanah, modal dan mesin. Manusia diperalat untuk mengejar tingkat output yang tinggi namun dalam proses ini manusia bukan sebagai pewaris dari apa yang dihasilkan. Pembangunan yang mempunyai pendekatan kebutuhan dasar hanya berorientasi pada kebutuhan dasar manusia agar dapat keluar dari kemelut kemiskinan. Model ini telah mengiring manusia terpasung hingga tidak memiliki pilihan-pilihan lain. Sedangkan pembangunan dengan kesejahteraan manusia memandang manusia dalam proses pembangunan sebagai penerima bukan sebagai peserta yang berpartisipasi aktif atau dengan perkataan lain manusia tidak mengambil bagian untuk berperan dalam pembangunan.

Dengan demikian, pada tahun 1990 UNDP dalam laporannya “*Global Human Development Report*” memperkenalkan konsep “Pembangunan Manusia (*Human Development*)”, sebagai paradigma baru model pembangunan. Konsep ini lebih komprehensif dan bersifat holistik yang mencakup ketiga model sebelumnya.

Berbagai pergeseran dalam kebijaksanaan pembangunan menyebabkan pengukuran terhadap hasil-hasil pembangunan yang ada harus disesuaikan. Kebutuhan untuk melihat fenomena atau masalah dalam perspektif waktu dan

tempat sering menuntut adanya ukuran baku. Upaya untuk mengangkat manusia sebagai tujuan utama pembangunan, sebenarnya telah muncul dengan lahirnya konsep “*basic need development*”. Paradigma ini mengukur keberhasilan pembangunan dengan menggunakan Indeks Mutu Hidup (*Physical Quality of Life Index*), yang memiliki tiga parameter yaitu angka kematian bayi, angka harapan hidup waktu lahir dan tingkat melek huruf.

Kemudian dengan muncul dan berkembangnya paradigma baru pembangunan manusia, sejak tahun 1990 UNDP menggunakan **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** atau *Human Development Index (HDI)* untuk mengukur keberhasilan atau kinerja pembangunan manusia suatu negara atau wilayah. Sejalan dengan itu, Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara sebagai penyedia data memandang perlu menghitung Indeks Pembangunan Manusia agar dapat digunakan berbagai perangkat untuk melakukan pengkajian guna mengukur kinerja pembangunan manusia selama ini dalam kurun waktu tertentu dimana “*strong point*”nya pada pembangunan manusia dengan menggunakan parameter IPM atau HDI.

1.2 Tujuan Penulisan.

Tujuan penulisan laporan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2008 Kabupaten Toraja Utara adalah:

- a. Memberikan data dan informasi tentang kinerja pembangunan yang diukur berdasarkan peningkatan kualitas hidup manusia.

- b. Sebagai sumber informasi dasar dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dalam rangka upaya peningkatan kualitas hidup manusia.
- c. Dapat dipergunakan sebagai alat evaluasi dan memonitor program pembangunan yang telah dilakukan, agar prioritas pembangunan dapat ditentukan.

1.3 Sistematika Penulisan

Penulisan laporan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Toraja Utara disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- Bab I Menguraikan mengenai latar belakang, tujuan penulisan dan sistematika penulisan.
- Bab II Membahas tentang metodologi, yang meliputi pengertian konsep, metode yang digunakan dan penjelasan komponen-komponen dan cara penghitungan indeks masing-masing komponen serta sumber data yang digunakan.
- Bab III Membahas mengenai gambaran umum Kabupaten Toraja Utara yang diuraikan atas letak geografis, kependudukan, ekonomi (PDRB) potensi dari pemanfaatan sumber daya alam dan trend alokasi APBD.
- Bab IV Membahas mengenai kinerja pembangunan manusia, pencapaian indeks pembangunan manusia berdasarkan komponen
- Bab. V Kesimpulan dan saran.

BAB II METODOLOGI

Kebutuhan untuk melihat fenomena atau masalah sering menuntut adanya ukuran baku dengan menyusun indeks agregat yang memungkinkan diturunkannya satu angka yang merangkum berbagai dimensi masalah yang sedang menjadi topik bahasan.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui seberapa jauh upaya pemberdayaan yang telah dicapai masyarakat secara cepat adalah indikator komposit. Beberapa indikator komposit yang telah dikembangkan dan direkomendasi UNDP adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Jender (IPJ), Indeks Pemberdayaan Jender (IDJ), dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM). Indikator tersebut digunakan dalam perspektif yang berbeda, dan dalam penyajian laporan ini secara khusus hanya menyajikan IPM.

IPM digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian upaya pembangunan manusia secara keseluruhan dan bersifat agregatif. Meskipun demikian ukuran komposit ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran bagi para perencana pembangunan di daerah tentang kualitas pembangunan manusia yang telah dicapai selama ini. Secara umum, langkah yang ditempuh dalam menghadapi pengembangan tolok ukur fenomena yang sifatnya kuantitatif, selalu di mulai dengan memahami konsep dan definisi dan batasan baku masalah yang hendak diukur. Maka dalam laporan ini disajikan konsep

dan definisi dari beberapa indikator yang digunakan serta sumber data yang dibutuhkan dalam penyusunan buku ini.

2.1 Konsep dan Definisi

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup (e_0), indeks pendidikan (melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{IPM} = 1/3 [X(1) + X(2) + X(3)] \dots\dots\dots(1)$$

- Dimana :
- X(1): Indeks harapan hidup
 - X(2): Indeks pendidikan = $2/3$ (indeks melek huruf) + $1/3$ (indeks rata-rata lama sekolah).
 - X(3): Indeks paritas daya beli.

Nilai indeks hasil hitungan masing-masing komponen tersebut adalah antara 0 (keadaan terburuk) dan 1 (keadaan terbaik). Dalam laporan ini indeks tersebut dinyatakan dalam ratusan (dikalikan 100) untuk mempermudah penafsiran, seperti yang disarankan oleh BPS (BPS-UNDP, 1996).

Masing-masing indeks komponen IPM tersebut merupakan perbandingan antara selisih nilai suatu indikator dan nilai minimumnya dengan selisih nilai maksimum dan nilai minimum indikator yang bersangkutan

$$\text{Indeks } X(i) = \frac{X(i) - X(i) \text{ min}}{X(i) \text{ maks} - X(i) \text{ min}} \dots\dots\dots (2)$$

Rumusnya dapat disajikan sebagai berikut:

Dimana $X(i)$: Indikator ke-i (i=1,2,3)

$X(i)_{\text{maks}}$: Nilai maksimum $X(i)$

$X(i)_{\text{min}}$: Nilai minimum $X(i)$

Tabel 2.1
Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM
yang digunakan dalam penghitungan

Indikator Komponen IPM [=X(i)]	Nilai		Catatan
	Maksimum	Minimum	
1	2	3	4
Angka Harapan Hidup	85	25	Sesuai standar global (UNDP)
Angka Melek Huruf	100	0	Sesuai standar global (UNDP)
Rata-rata lama sekolah	15	0	Sesuai standar global (UNDP)
Konsumsi per kapita yang disesuaikan (Pendekatan terhadap daya beli)	732.720	300.000 (1996) 360.000 (1999)	UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan

Sumber : Indonesia Human Development Report 2001-Towards a new consensus (Democracy and Human Development in Indonesia)-BPS, BAPPENAS, UNDP

Seperti dalam rekomendasi UNDP, meskipun telah muncul berbagai kritik dan masukan berkaitan dengan rumusan indikator variabel IPM, hingga saat ini masih digunakan ketiga komponen diatas, yaitu komponen kesehatan (longevity) yang diwakili dengan usia harapan hidup (life expectancy at Age 0; e_0), komponen pengetahuan atau kecerdasan diwakili oleh dua buah indikator yaitu angka melek huruf (literacy rate/ Lit) dan rata-rata lama sekolah (Mean Years of Schooling/ MYS) dan indikator hidup layak (decent living) atau kemakmuran yang diwakili oleh purchasing power parity/paritas daya beli.

Berhubung data PPP sulit diperoleh maka digunakan PDRB riil perkapita.

2.1.1 Angka Harapan Hidup (e_0)

Seperti yang telah disebutkan dalam BPS-UNDP (1996: 8) bahwa sebenarnya agak “berlebihan” mengatakan variabel e_0 dapat mencerminkan “lama hidup” sekaligus “hidup sehat”, mengingat angka morbiditas tampaknya lebih valid dalam mengukur “hidup sehat”. Meskipun demikian, karena keterbatasan data dan hanya sedikit negara yang memiliki data morbiditas yang dapat dipercaya maka variabel tersebut tidak digunakan untuk tujuan perbandingan.

Penggunaan angka harapan hidup didasarkan atas pertimbangan bahwa angka ini merupakan resultante dari berbagai indikator kesehatan. AHH merupakan cerminan dari ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, sanitasi lingkungan, pengetahuan ibu tentang kesehatan, gaya hidup masyarakat, pemenuhan gizi ibu dan bayi, dan lain-lain. Oleh karena itu AHH untuk sementara bisa mewakili indikator lama hidup.

2.1.2 Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah

Angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan data Susenas Kor, dalam tulisan ini menggunakan penduduk 15 tahun ke atas. Indikator angka melek huruf diperoleh dari variabel kemampuan membaca dan menulis baik huruf latin maupun huruf lainnya.

Penghitungan indikator rata-rata lama sekolah dilakukan dengan cara penghitungan tidak langsung. Langkah pertama adalah memberikan bobot variabel “ijazah/STTB tertinggi” yang dimiliki sebagaimana disajikan pada Tabel 2.2. Langkah selanjutnya menghitung rata-rata tertimbang dari variabel tersebut sesuai bobotnya. Secara sederhana prosedur penghitungan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$MYS = \frac{\sum_{i=1}^{10} f_i * LSi}{\sum_{i=1}^{10} f_i}$$

Dimana :

- MYS* : rata-rata lama sekolah (dalam tahun)
- Fi* : frekuensi penduduk yang berumur 10 tahun ke atas untuk jenjang pendidikan i..
- Si* : skor masing-masing jenjang pendidikan i.
- LSi* : 0 (bila tidak/belum pernah sekolah)
- LSi* : Si (bila tamat)
- LSi* : Si + kelas yang diduduki – 1 (bila masih bersekolah dan pernah tamat)
- LSi* : kelas yang diduduki – 1 (bila jenjang yang diduduki SD/SR/MI/Sederajat)
- i* : jenjang pendidikan (1,2,3, ...,10):

Tabel 2.2.
Jenjang Pendidikan dan Skor yang Digunakan untuk
Menghitung Rata-rata Lama Sekolah (MYS)

1. Jenjang Pendidikan	Skor
1	2
1. Tidak punya	0
2. SD/MI/Sederajat	6
3. SLTP/MTs/Sederajat/Kejuruan	9
4. SMU/MA/Sederajat/Kejuruan	12
5. Diploma I/II	14
6. Diploma III/Sarjana Muda	15
7. Diploma IV/S1	16
8. S2	18
9. S3	21

2.1.3 Purchasing Power Parity (PPP)

Komponen standar hidup layak atau dikenal juga sebagai Purchasing Power Parity (PPP) yang digunakan dalam laporan ini adalah PDRB riil perkapita yang telah disesuaikan (*adjusted real GRDP per capita*), seperti juga yang digunakan oleh UNDP. Berbeda dengan laporan IPM 1996 yang telah menggunakan komponen yang lebih baik yaitu dengan menggunakan konsumsi riil perkapita dari hasil Susenas Modul Konsumsi yang disesuaikan dengan indeks PPP. Dengan menggunakan PDRB riil perkapita ini berarti mengasumsikan bahwa hasil dari PDRB daerah dapat dinikmati oleh sebagian besar penduduk wilayah ini.

Rumus Atkinson yang digunakan untuk penyesuaian rata-rata konsumsi riil, yang dianggap kemampuan daya beli (U), secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut:

$U(y) = y'$	jika $y \leq y'$
$= y' + 2(y-y')^{(1/2)}$	jika $y' < y \leq 2y'$
$= y' + 2(y-y')^{(1/2)} + 3(y-2y')^{(1/3)}$	jika $2y' < y \leq 3y'$
$= y' + 2(y-y')^{(1/2)} + 3(y-2y')^{(1/3)} + 4(y-3y')^{(1/4)}$	jika $3y' < y \leq 4y'$

Dimana:

y = PDRB riil per kapita

y' = threshold atau tingkat pendapatan tertentu yang digunakan

sebagai batas kecukupan (Garis Kemiskinan) yang dalam laporan ini nilai y ditetapkan sebesar Rp. 1.229.208.- perkapita setahun.

2.2 Sumber Data

Ruang lingkup dalam pelaporan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Toraja Utara tahun 2008 hanya mencakup wilayah kabupaten. Cakupan tersebut disebabkan oleh keterbatasan besarnya sampel dan ketersediaan data sekunder.

Sumber data yang digunakan adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2010, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Toraja

Utara 2010, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toraja Utara.

<http://torutkab.bps.go.id>

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1 Letak Geografis

Kabupaten Toraja Utara dengan ibu kota Rantepao memiliki luas wilayah sekitar 1.151,47 km². Daerah ini terdiri dari 21 kecamatan dengan 251 desa/kelurahan.

Jarak ibukota Kabupaten Toraja Utara dengan ibukota Propinsi Sulawesi Selatan ± 329 km dengan melewati Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidrap, Kota Pare-Pare, Kabupaten Barru, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Maros.

Kabupaten Toraja Utara terletak dengan posisi antara 2° - 3° Lintang Selatan dan 119° - 120° Bujur Timur, yang berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Kabupaten Mamuju sebelah utara, Kabupaten Tana Toraja sebelah selatan serta pada sebelah timur dan barat masing-masing berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Sulawesi Barat.

3.2 Kependudukan

Penduduk Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2010, sekitar 216.762 yang terdiri dari 109.747 laki-laki dan 107.015 perempuan dengan sex ratio 103, yang berarti terdapat sekitar 103 orang laki-laki diantara 100 perempuan.

Kepadatan penduduk perkilometer persegi sekitar 188 jiwa. Kecamatan yang terpadat penduduknya adalah Kecamatan Rantepao yang merupakan ibukota kabupaten.

Jumlah penduduk usia muda (0-14 tahun) pada tahun 2010 adalah sekitar 81.340 orang, penduduk usia 15-64 tahun berjumlah 120.612 yang disebut dengan usia produktif dan mereka yang berusia lanjut (65+ tahun lebih) sekitar 14.810 orang. Setelah dihitung maka angka beban tanggungan adalah sebesar 125,44 atau secara hipotesis bahwa setiap 100 penduduk usia produktif di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2010 menanggung beban ekonomi sekitar 25 orang usia tidak produktif.

3.3 Perekonomian

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB (atas dasar harga konstan) yang berhasil diperoleh pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai PDRB tahun sebelumnya. Penggunaan angka atas dasar harga konstan ini dimaksudkan untuk menghindari pengaruh perubahan harga, perubahan yang diukur adalah perubahan produksi sehingga menggambarkan pertumbuhan riil ekonomi. Sejak Tahun 2000 pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun regional provinsi dan kabupaten/kota dihitung dengan menggunakan harga konstan 2000 sebagai tahun dasar.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2010 sebesar 7,00 persen. Pertumbuhan ini tumbuh lebih cepat dibanding tahun sebelumnya yang hanya 5,74 persen. Artinya pertumbuhan ekonomi Toraja Utara cukup baik

mengingat kabupaten Toraja Utara baru tiga tahun terbentuk.

Selanjutnya struktur ekonomi Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2010, sektor Pertanian mempunyai peran yang cukup besar terhadap perekonomian daerah hal ini ditunjukkan dengan angka 40,29. Artinya potensi ekonomi masih bertumpuh pada sektor Pertanian terutama sub sektor Tanaman Bahan Makanan.

Sektor lain yang mempunyai kontribusi cukup besar adalah sektor perdagangan, hotel dan restaurant jasa dengan kontribusi sekitar 19,17 persen terhadap total PDRB pada tahun 2010. Sektor lain yang mempunyai kontribusi terkecil di daerah ini adalah sektor pertambangan dan penggalian yaitu hanya 0,50 persen dari total PDRB.

Sementara itu, PDRB perkapita Kabupaten Toraja Utara tahun 2010 adalah sebesar 6.916.512 rupiah sedangkan PDRB Sulawesi Selatan 14.669.097 rupiah.

BAB 1V

KINERJA PEMBANGUNAN MANUSIA

Model pembangunan manusia telah menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan yang berarti bahwa pembangunan yang dilaksanakan adalah dari rakyat (*of people*), untuk rakyat (*for people*), dan oleh rakyat (*by people*). Pembangunan dari rakyat mengandung makna pemberdayaan yaitu peningkatan kapabilitas melalui pendidikan, pelatihan, pemeliharaan kesehatan yang lebih baik, perumahan layak huni dan perbaikan gizi. Pembangunan untuk rakyat berarti hasil pembangunan benar-benar diterima semua rakyat secara adil, buah pertumbuhan ekonomi harus terlihat pada kehidupan rakyat sehari-hari, tidak terjadi ketimpangan dalam masyarakat. Proses ini biasanya tidak secara otomatis tampak, akan tetapi memerlukan waktu serta manajemen kebijakan yang hati-hati. Pembangunan oleh rakyat berarti rakyat harus benar-benar ikut mengambil bagian dan berperan aktif dalam pembangunan, bukan sebagai penonton dan penerima hasil pembangunan. Dengan berperan aktif berarti ikut serta berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kehidupannya.

Modal manusia (*human capital*) merupakan salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Dengan modal manusia yang berkualitas kinerja ekonomi diyakini akan lebih baik. Kualitas modal manusia dapat dicerminkan oleh tingkat pendidikan, kesehatan ataupun indikator-indikator lain. Oleh sebab itu, dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan pembangunan manusia. Kebijakan pembangunan yang tidak

mendorong peningkatan kualitas manusia, akan membuat daerah yang bersangkutan tertinggal dari daerah yang lain, termasuk dalam hal ini kinerja ekonominya. Dengan kata lain, bahwa peningkatan kualitas modal manusia akan sekaligus memberikan mamfaat dalam mengurangi ketimpangan antar daerah.

4.1 Indeks Pembangunan Manusia

Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan angka agregat yang menggambarkan kemajuan pembangunan manusia disuatu daerah/wilayah. Jarak yang harus ditempuh (shortfall) suatu wilayah mempunyai nilai maksimum 100. Artinya jika suatu wilayah telah mencapai angka 100 maka pembangunan manusia secara keseluruhan telah tercapai. Jadi suatu wilayah yang mempunyai angka IPM yang masih rendah atau masih jauh dari pembangunan manusia dapat dikatakan masih jauh. Dan tentunya hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh semua daerah/wilayah/negara. Oleh karena itu, pemerintah sebagai penggerak utama harus mengupayakan pemberdayaan manusia sehingga dapat memperpendek jarak tujuan.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2009 sekitar 68,92 meningkat menjadi 69,56 di tahun 2010. Meningkatnya IPM Toraja Utara di tahun 2010 maka posisi peringkat IPM Toraja Utara se Sulawesi Selatan bergeser, dari peringkat ke 21 ditahun 2009 menjadi peringkat ke 19, walaupun posisinya masih jauh namun pergeseran ini memperlihatkan bahwa Toraja Utara telah memperlihatkan bahwa kinerjanya cukup baik dalam pembangunan manusia di tahun 2010. Jika dibandingkan dengan kabupaten

lainnya maka Toraja Utara yang memiliki kinerja terbaik se Sulawesi Selatan dalam meningkatkan Pembangunan Manusia di tahun 2010. Kabupaten lain yang mengalami peningkatan adalah Soppeng dan Wajo, masing-masing bergeser satu point, sementara ada empat kabupaten yaitu Sinjai, Pangkep, Bone dan Tana Toraja posisi IPMnya sedang kabupaten lainnya posisi peringkatnya tetap.

Berdasarkan kriteria UNDP nilai IPM kurang dari 51 digolongkan sebagai IPM sedang, nilai IPM antara 51 sampai dengan 79 (51-79) digolongkan sebagai IPM menengah dan nilai IPM di atas 79 (> 79) digolongkan tinggi. Dengan demikian sesuai dengan kriteria tersebut, IPM Kabupaten Toraja Utara tergolong IPM menengah, baik IPM pada tahun 2009 maupun IPM pada tahun 2010.

Tabel 4.1.
IPM Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Terdekat
Tahun 2009-2010

Kabupaten/Kota	IPM		Peringkat Propinsi	
	2009	2010	2009	2010
1	2	3		
01. Toraja Utara	68,92	69,56	21	19
02. Tana Toraja	71,39	71,84	10	11
03. Luwu Timur	72,29	72,79	8	8
04. Luwu	73,59	73,98	6	6
05. Enrekang	74,19	74,55	4	4
06. Pinrang	72,61	73,21	7	7
Sulawesi Selatan	70,94	71,62		

Sumber : BPS Sul-Sel.

4.2 Bidang Kesehatan

Menurut Undang-Undang Kesehatan Indonesia tahun 1992, Kesehatan diartikan sebagai keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Hidup sehat merupakan kebutuhan dasar manusia dan setiap insan mempunyai hak untuk menikmati derajat kesehatan yang tinggi bagi kehidupannya. Agar dapat dicapai derajat kesehatan yang tinggi, penduduk juga harus mendapatkan hak-haknya atas kecukupan dalam memperoleh makanan, air minum, pakaian, pemukiman, pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial.

Pemerintah mempunyai peranan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan penduduk, karena kesehatan merupakan investasi untuk meningkatkan SDM. Disamping itu, setiap individu bertanggung jawab terhadap kesehatan dirinya, keluarganya dan lingkungannya. Kemajuan dalam pembangunan kesehatan akan mempunyai pengaruh terhadap pembangunan nasional dan sebaliknya pembangunan nasional akan mempunyai dampak penting terhadap derajat kesehatan penduduk.

Pada hakekatnya derajat kesehatan penduduk sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor prilaku masyarakat, lingkungan hidup, pelayanan kesehatan dan faktor keturunan. Oleh sebab itu, pembangunan kesehatan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat guna mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi perlu dijalankan antar intersektoral dengan menyertakan peran serta masyarakat dan swasta.

Untuk mengetahui keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan dapat dilihat dari derajat kesehatan dan gizi penduduk, meningkatnya pelayanan kesehatan, dan bertambah baiknya lingkungan kesehatan masyarakat.

4.2.1 Indeks Kesehatan

Indeks kesehatan diwakili dengan Angka Harapan Hidup (e_0) diharapkan dapat mencerminkan pembangunan manusia dibidang kesehatan. Pada tahun 2009 indeks kesehatan Kabupaten Toraja Utara tercatat sekitar 80,82 meningkat ditahun 2010 menjadi 80,89. Dengan angka tersebut menggambarkan bahwa kondisi kesehatan masyarakat Toraja Utara relatif semakin baik. Walaupun indeks kesehatan di daerah ini relatif baik akan tetapi perhatian di bidang ini perlu di tingkatkan.

4.2.2 Angka Harapan Hidup

Salah satu indikator kesejahteraan rakyat di bidang kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Angka harapan hidup Kabupaten Toraja Utara sekitar 73,54 tahun pada tahun 2010.

Sedangkan Angka Harapan Hidup Sulawesi Selatan tahun 2010 sekitar 70,00 yang berarti lebih rendah dari AHH Kabupaten Toraja Utara. Hal ini dapat diartikan bahwa tingkat kesehatan masyarakat Kabupaten Toraja Utara lebih baik dibandingkan tingkat kesehatan masyarakat Sulawesi Selatan secara keseluruhan

Besar kecilnya AHH dipengaruhi oleh banyak variabel baik yang bersifat endogen (kondisi bawaan) maupun eksogen (pengaruh dari luar).

Khusus untuk variabel eksogen dapat dibuat daftar yang cukup panjang diantaranya mencakup input makanan, upaya kesehatan dan kondisi lingkungan yang juga dipengaruhi oleh variabel lainnya. Pengaruh variabel-variabel tersebut dapat bersifat langsung maupun tidak langsung, dapat seketika maupun dengan tenggang waktu (time lag) tertentu. Pengaruh variabel-variabel tersebut bekerja secara tersendiri maupun bersinergi dengan variabel lain.

Sementara itu, masih terdapat beberapa variabel yang diperkirakan berpengaruh terhadap AHH/e_0 . Secara umum diharapkan bahwa dengan semakin tingginya persentase balita yang ditolong kelahirannya oleh tenaga medis akan semakin tinggi kemungkinan kelangsungan hidupnya. Tetapi perkiraan hubungan tersebut dapat menyimpang jika pertolongan tenaga medis digunakan untuk proses kelahiran yang abnormal dan dengan penanganan yang sudah terlambat.

4.2.3 Fasilitas Kesehatan

Fasilitas dan tenaga kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya peningkatan dan penanggulangan kesehatan masyarakat. Fasilitas yang tersedia tanpa didukung dengan tenaga yang mengerti di bidangnya tentunya akan kurang bermakna, begitu juga sebaliknya tenaga yang tersedia tanpa fasilitas yang memadai akan mendapatkan hasil yang kurang optimal.

Dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat disamping telah tersedianya Rumah Sakit Umum sebanyak 1 buah berada di ibu kota Kabupaten Toraja Utara, pada tahun 2010 terdapat 21 buah Puskesmas

yang tersebar di 21 kecamatan. Dengan demikian pada tahun 2010 rasio penduduk per puskesmas adalah sekitar 10.322 orang.

Pada tahun 2010 tenaga paramedis di Kabupaten sebanyak 305 orang, tenaga medis dokter (dokter ahli, dokter umum dan dokter gigi) pada tahun 2010 berjumlah 40 orang, Dengan demikian pada tahun 2010 dari 5.419 orang penduduk terdapat seorang dokter

4.3 Bidang Pendidikan

Sumber daya manusia sangat penting peranannya dalam proses pembangunan. Untuk itu, pembangunan yang dilakukan bermuara pada pembangunan manusia. Salah satu komponen dalam pembangunan manusia adalah peningkatan di bidang pendidikan, karena merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah Sulawesi Selatan sangat konsisten dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Program Pembangunan Daerah (Propeda) Sulawesi Selatan yang menyebutkan strategi yang dilakukan di antaranya; perluasan dan pemerataan di dalam memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat melalui peningkatan anggaran pendidikan secara berarti.

Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang mendapat prioritas utama dalam pembangunan nasional. Hal ini disadari karena pendidikan dipandang sebagai unsur utama dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pendidikan telah diupayakan pemerintah melalui berbagai program,

di antaranya pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, program wajib belajar 9 tahun, beasiswa dan lain-lain

Program pendidikan mempunyai andil yang sangat besar terhadap kemajuan bangsa, ekonomi dan sosial. Sehingga keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan merupakan salah satu parameter untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat.

4.3.1 Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan merupakan gabungan dari dua indikator pendidikan yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Indeks pendidikan di Kabupaten Tana pada tahun 2010 sebesar 71,90 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 70,98. Dengan demikian memperlihatkan bahwa kesadaran akan mamfaat pendidikan di Toraja Utara semakin mendapat perhatian. Hal ini terjadi angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan. Namun jika di lihat akan angka Indeks pendidikan 71,90 maka pendidikan di Toraja Utara masih sangat perlu mendapatkan perhatian karena masih berada pada kondisi cukup.

4.3.2 Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Toraja Utara tergolong masih rendah. Hal ini terlihat pada tahun 2010 penduduk yang bisa baca tulis sekitar 83,80 persen dari total penduduk umur 15 tahun keatas, dengan demikian Angka Buta Huruf di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2010 masih sekitar 16,20

persen, masih relatif tinggi. Oleh karenanya Angka Melek Huruf di Kabupaten Toraja Utara perlu mendapat perhatian karena masih rendahnya kemampuan membaca karena angka Buta Huruf di daerah ini relatif masih tinggi.

4.3.3 Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator rata-rata lama sekolah berguna untuk memonitor tingkat pencapaian setiap penduduk dalam bersekolah. Interpretasinya, semakin tinggi angka tersebut maka semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk.

Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Toraja Utara yang berumur 15 tahun ke atas pada tahun 2010 sekitar 7,22 tahun, dengan kata lain pada periode tersebut, setiap penduduk mempunyai jenjang pendidikan sekolah menengah pertama yang sedang duduk dikelas 2. Angka ini sedikit kecil apabila dibandingkan dengan angka provinsi yang sebesar 7,84.

4.3.4 Sarana dan Prasarana Pendidikan.

Ketersediaan fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar merupakan dua hal yang memegang peranan penting terhadap maju atau mundurnya dunia pendidikan. Salah satu hal yang selama ini masih menjadi kendala adalah kelangkaan jumlah guru pada daerah-daerah terpencil. Isu yang masih sering terdengar bahwa banyaknya guru yang enggan ditempatkan pada daerah terpencil tersebut sehingga mengakibatkan menumpuknya jumlah guru di daerah-daerah perkotaan.

Untuk melihat ketersediaan guru pada suatu daerah dapat dilihat dengan membandingkan jumlah guru. Walaupun belum ada angka ideal sebagai patokan namun semakin kecil angka ini maka akan menggambarkan beban seorang guru yang semakin kecil pula.

Pada tahun 2010 rasio murid terhadap guru SD adalah 18. artinya ada sekitar 18 murid SD yang harus ditangani oleh seorang guru pada sebuah sekolah tempat dia mengajar, sementara rasio murid terhadap guru SLTP/ sederajat dan SLTA/ sederajat masing-masing adalah 15 dan 13, Angka rasio tersebut dapat diinterpretasikan bahwa semakin kecil angka tersebut artinya pengawasan/beban kerja seorang guru terhadap murid/siswa sekolah akan lebih baik

Dari masing-masing angka rasio tiap jenjang pendidikan, nampak bahwa rasio murid terhadap guru SD yang lebih besar dari yang lainnya. Dengan demikian perlu perhatian yang lebih terhadap hal ini karena jenjang pendidikan SD merupakan dasar dari pendidikan artinya guru SD sebaiknya secara kuantitatif dan kualitatif perlu ditingkatkan.

Untuk melihat rata-rata banyaknya murid yang bersekolah dalam setiap jenjang pendidikan dapat diketahui dengan membandingkan jumlah murid terhadap sekolah. Salah satu kegunaannya adalah untuk melihat apakah sudah waktunya pemerintah atau pihak swasta untuk membangun sekolah baru pada suatu tempat.

4.3. Bidang Ekonomi

Dalam bidang ekonomi telah memperlihatkan adanya kecenderungan yang semakin membaik, hal tersebut dapat ditunjukkan dengan oleh indikator pertumbuhan ekonomi, produk domestik regional bruto perkaita, paritas daya beli dan dampak terhadap adanya perbaikan ekonomi. Dampak tersebut dapat dicerminkan oleh beberapa informasi pendukung seperti ketersediaan air bersih, listrik dan konsumsi rumah tangga. Dalam bahasan berikut tidak lagi ikemukakan perumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita, kerana hal tersebut telah dikemukakan dalam bab sebelumnya

4 .4. Indeks Paritas Daya Beli

Pengukuran pembangunan manusia dikaitkan dengan beberapa aspek, diantaranya adalah aspek daya beli masyarakat. Indeks daya beli masyarakat merupakan gambaran kemampuan ekonomi penduduk. Kemampuan itu diperoleh dari pengeluaran konsumsi rumah tangga, baik konsumsi makanan maupun non makanan.

Paritas daya beli (*PPP = Purchasing Power Parity*) penduduk Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2010 sebesar 601,89 ribu. Selanjutnya Indeks daya beli sekitar 55,90.

Tabel 4.2
IPM Kabupaten Toraja Utara Menurut Komponennya
Tahun 2009-2010

No.	Indikator	2009	2010
1	2	3	
1	Kesehatan		
	a. Angka Harapan Hidup	73,49	73,54
	b. Indeks Kesehatan	80,82	80,89
2	Pendidikan		
	a. Angka Melek Huruf	83,03	83,80
	b. Rata-rata Lama Sekolah	7,03	7,22
	c. Indeks Pendidikan	70,98	71,90
3	Hidup Layak		
	a. Paritas Daya Beli	597,86	601,89
	b. Indeks Daya Beli	54,97	55,90
IPM			

Sumber : BPS kabupaten Toraja Utara

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan satu ukuran yang dapat mencerminkan aspek-aspek pembangunan dan dianggap cukup baik untuk menggambarkan aspek sosial maupun ekonomi yang telah dicapai oleh suatu daerah. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Toraja Utara tahun 2010 adalah 69,56
2. Komponen Indeks Pembangunan Manusia tahun 2010, indeks kesehatan sebesar 80,89; indeks pendidikan 71,90 dan indeks daya beli 55,90 persen.
3. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Toraja Utara tahun 2010 sebesar 7,00 persen
4. Produk Domestik Regional Bruto perkapita atas dasar harga berlaku sekitar Rp 6.916.512

5.2 Saran

1. Usaha peningkatan kemampuan dasar sumber daya manusia dalam bidang kesehatan diantaranya melalui pemerataan pelayanan kesehatan, peningkatan status gizi terutama balita dan peningkatan peran serta masyarakat.
 - a. Pemerataan pelayanan kesehatan diantaranya melalui :

- Penambahan sarana pelayanan kesehatan
- Penambahan tenaga medis dan paramedis
- Penyediaan obat-obatan yang harganya terjangkau oleh masyarakat

b. Peningkatan peran serta masyarakat

- Melakukan intervensi kepemimpinan yang berwawasan kesehatan untuk semua,
- Melakukan intervensi kesehatan pada setiap kelompok masyarakat sehingga muncul usaha kesehatan bersama masyarakat,
- Memanfaatkan sumber dana yang ada pada masyarakat untuk membiayai kegiatan bidang kesehatan.

Dalam rangka mencapai sasaran 'Indonesia Sehat 2010' diperlukan program kesehatan yang terpadu. Oleh karena itu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, pemerintah perlu melakukan berbagai program baik yang sifatnya promotif, preventif maupun kuratif antara lain melalui pendidikan kesehatan, imunisasi, pemberantasan penyakit menular, penyediaan air bersih dan sanitasi, dan pelayanan kesehatan.

2. Usaha Bidang Pendidikan melalui :

- a. Peningkatan angka melek huruf dengan upaya pemberantasan buta aksara melalui kejar paket A yang ditindaklanjuti dengan

pembentukan kelompok pembaca dan penyediaan perpustakaan keliling. Dengan demikian angka melek huruf di kabupaten ini yang masih rendah dapat meningkat pada waktu yang akan datang.

- b. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya. Untuk anak usia sekolah yang sudah bekerja membantu perekonomian rumahtangga, hendaknya waktu bekerja diatur sedemikian rupa tanpa mengganggu waktu belajar.
- c. Persoalan pendidikan yang lain adalah penduduk putus sekolah, yang diduga sebagian besar berasal dari keluarga tidak mampu, apalagi setelah bangsa kita dilanda krisis ekonomi. Oleh karena itu pemerintah perlu berupaya mengatasinya melalui berbagai program, baik program penyelamatan yang bersifat subsidi langsung maupun program pemulihan yang lebih ditujukan kepada penataan sistem pendidikan serta pemberdayaan keluarga dalam kaitannya dengan pendidikan anak.
- d. Selain pengembangan sistem pendidikan formal, maka kebijakan perlu pula ditujukan untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan pendidikan non formal. Kebijakan ini ditujukan untuk kelompok penduduk yang karena pertimbangan usia maupun alasan lainnya, tidak dapat ikut dalam sistem pendidikan formal. Dengan kebijakan pendidikan non formal ini maka diharapkan terjadi peningkatan kemampuan dasar di kalangan penduduk, terutama mereka yang berlatar belakang pendidikan formal rendah atau

tidak ada sama sekali. Kemampuan tersebut mencakup membaca/menulis, pengetahuan umum, serta keterampilan-keterampilan yang dipandang perlu.

<http://torutkab.bps.go.id>